

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya pembangunan adalah proses perubahan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan lebih baik, secara material maupun spiritual. Pembangunan haruslah dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, serta institusi-institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan dan pengentasan kemiskinan.¹ Sebagai salah satu proses, kebutuhan yang ada digunakan untuk menilai pembangunan yang dilakukan terhadap respon perubahan yang terjadi dalam masyarakat serta tuntutan pergeseran waktu akibat berkembangnya system sosial kemasyarakatan, peradaban, system dan teknologi yang lebih maju.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui tingkat Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia.²

Pembangunan manusia merupakan upaya untuk memperluas peluang penduduk mencapai hidup layak yang dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan.³ Manusia berperan penting dalam sebuah pembangunan dan kesejahteraan yang diinginkan serta manusia juga

¹ Machkel P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi ke-9 Terjemahan oleh Haris Munandar dan Puji*, (Jakarta: Erlangga, 2011)

² Denni Sulistio Mirza, "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap IPM Jawa Tengah", *Jejak*, Vol. 4, No. 2, 2011

³ Departemen Agama RI, *Syaamil quran (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 78.

dipandang sebagai subjek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat itu sendiri.

Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yaitu dengan pembangunan ekonomi, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah bersama dengan segenap lapisan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.⁴

Menurut Fhino dan Priyo, ketiga unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama lain. Selain dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut IPM juga dipengaruhi faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.⁵

Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output perkapita yang menunjukkan pertumbuhan upah riil dan meningkatkan standar hidup. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator. Melalui anggaran belanja, pengeluaran pemerintah sebagian digunakan untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur penting.⁶

Semakin tinggi angka IPM, maka akan tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan BPS, tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari Angka harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata

⁴ Badan Pusat Statistika, "Indeks Pembangunan Manusia" dalam <https://www.bps.go.id> diakses pada 18 September 2021.

⁵ Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi, *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia* (The 3rd National Conference UKWMS, 2009), hlm. 2

⁶ Pubayu Budi Santoso dan Retno Puji Rahayu, "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri" *Dinamika Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, 2005.

Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita. Amartya Sen pemenang nobel India dalam Yusniah juga berpendapat bahwa IPM memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan AHH saat kelahiran, pengetahuan yang dihitung dari HLS dan RLS, dan standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita.⁷

Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia terus membaik setiap tahunnya dan posisi Indonesia dalam urutan IPM di ASEAN menempati urutan keempat. Dalam satu dekade ini, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. IPM Indonesia meningkat dari 69,55 pada tahun 2015 menjadi 71,92 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,87 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” sejak tahun 2016. Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2015–2019 menjadi sebesar 0,7 persen per tahun.

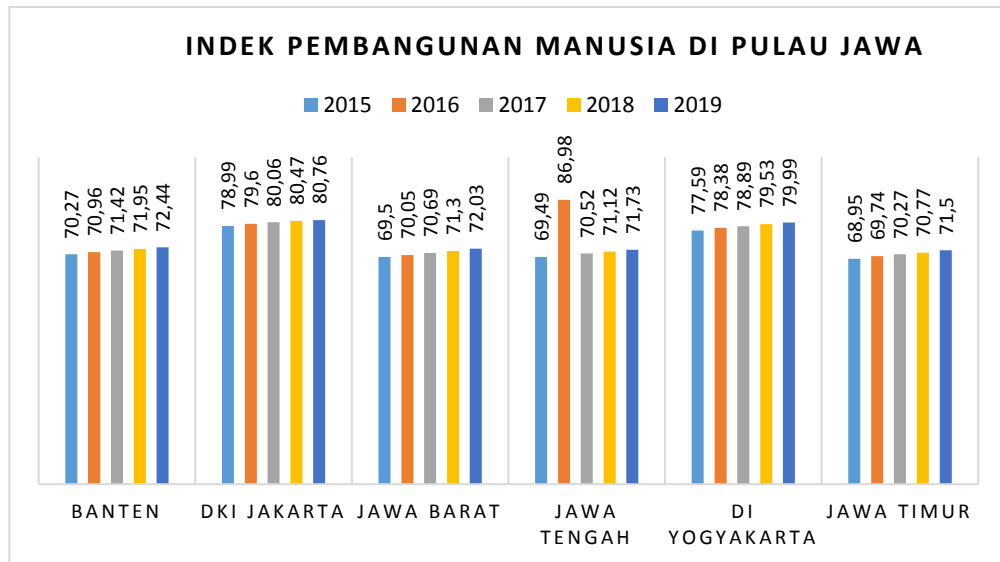


Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2019

Pulau Jawa menjadi salah satu penyumbang terbesar Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Berdasarkan gambar 1.2 rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten sebesar 71,41, Provinsi DKI Jakarta sebesar 79,98,

⁷ Yusniah Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Indocamp, 2018), hlm. 9

Provinsi Jawa Barat sebesar 70,71, Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,97, Provinsi DI Yogyakarta sebesar 78,88, dan Provinsi Jawa Timur sebesar 70,25.



Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa Tahun 2015-2019

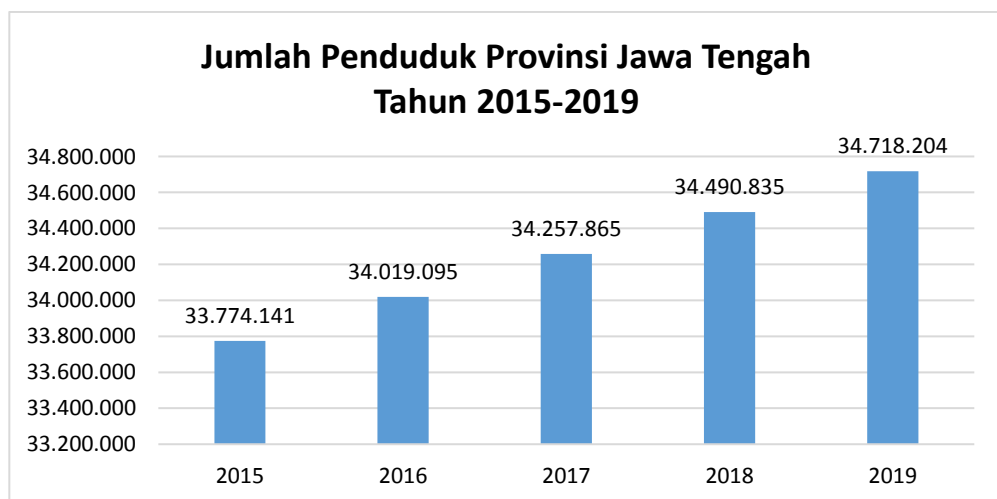
Jika dianalisis, hanya terdapat 2 provinsi di Pulau Jawa yang memiliki range IPM diatas 75. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki range IPM dibawah 75. Hal ini terjadi karena kurangnya peran pemerintah untuk meningkatkan unsur-unsur pembangunan manusia seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.⁸ Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi mengakibatkan naiknya produktifitas perekonomian sehingga tingkat pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Padahal, nvestasi pada bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti pada penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar.⁹

Dalam Pembangunan Manusia, jumlah penduduk menjadi salah satu indikator penentuan IPM. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduknya. Pada daerah dengan kepadatan yang tinggi, usaha

⁸ Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat*. (Yogyakarta: STIE YKPN, 2004)

⁹ Mirza, Denni Sulistio, "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006- 2009", *Economics Development Analysis Journal*, Vol 1, No. 2, 2012.

peningkatan kualitas penduduk akan lebih sulit dilakukan. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, Keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan.¹⁰ Terlebih jika kondisi ledakan penduduk tidak dapat terkontrol dengan baik berpotensi menjadi penyebab munculnya kemiskinan di suatu daerah. Perlu diketahui, Jumlah penduduk inilah yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.¹¹ Terjadinya penambahan jumlah penduduk yang terlalu besar dan tanpa diimbangi dengan sarana penunjang seperti Pendidikan dan kesehatan yang baik akan membuat tingkat IPM menjadi rendah serta akan menimbulkan berbagai masalah dan menghambat pembangunan ekonomi suatu daerah. Berikut merupakan data jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.3 Data Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan angka jumlah penduduk di Jawa Tengah yang terus menerus mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 sebesar 33.774.141 jiwa, pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang mencapai 34.019.095, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 34.718.204 jiwa. Terjadinya peningkatan jumlah

¹⁰ Christiani, C., Pratiwi T., Martono B. 2014. Analisis Dampak Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*.

¹¹ M. Noor Said, *Dinamika Penduduk*, (Semarang: ALPRIN, 2019), hlm. 19-20

penduduk disebabkan karena tingkat kelahiran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019 rata-rata meningkat.

Angka pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional. Angka pertumbuhan yang kecil tidak berarti peningkatan jumlah penduduk yang kecil juga. Secara absolut pertumbuhan penduduk Jawa Tengah lebih besar dibandingkan provinsi lain. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang memang sudah sangat besar bila dibandingkan provinsi lain terutama provinsi di luar Pulau Jawa. Mengamati pertumbuhan penduduk di tingkat Kabupaten/Kota, terlihat kota Semarang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu sebesar 1,57%. Sementara itu, kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan terendah yaitu Kota Magelang 0,20%.¹²

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sundari Rahma Sari Putri bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi yang baik maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk. Dampak penambahan penduduk mengakibatkan tidak seimbangya kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk yang terus-menerus meningkat akan menimbulkan masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan.¹³

Menurut teori yang dikemukakan oleh Rostow, bahwa jumlah penduduk miskin yang menurun setiap tahunnya dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan sarana prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial sebagai instrument untuk mengurangi tingkat kemiskinan.¹⁴ Teori Rostow dan Musgrave memperkenalkan model pembangunan tentang pengembangan pengeluaran

¹² Provinsi Jawa Tengah dalam <https://www.google.com/amp/s/tumoutounews.com/2019/12/03/jumlah-penduduk-jawa-tengah-tahun-2020/amp/> diakses pada tanggal 7 September 2021

¹³ Sundari Rahma Sari Putri, Skripsi: *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1990-2018*, (Medan: UINSU, 2019), hlm. 23.

¹⁴ Rahmah Amalia, dkk. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat" *Jurnal analisis* Vol. 4, No. 2. Hlm. 184

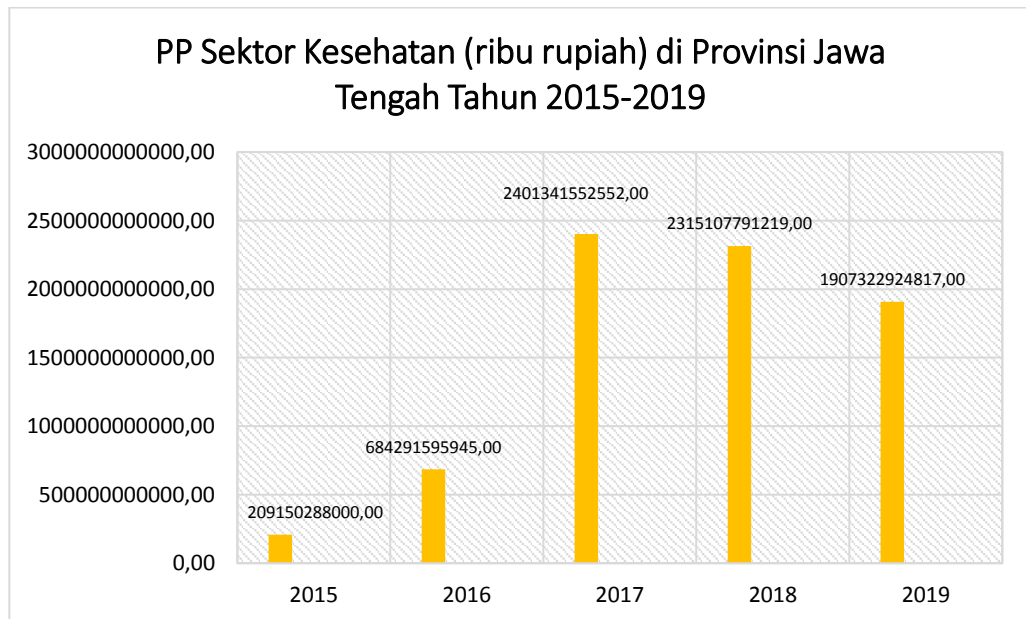
pemerintah. Teori ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada awal terjadinya perkembangan ekonomi presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.¹⁵

Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi IPM, kesehatan diartikan sebagai salah satu tujuan pembangunan yang mendasar, kesehatan sangat penting artinya bagi kesejahteraan dan fundamental dalam kaitannya dengan gagasan lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai inti makna pembangunan yang sesungguhnya. Dengan pembangunan yang lebih tinggi maka warga negara dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kepentingan kesehatan dan dengan kesehatan yang lebih baik produktifitas dan pendapatan lebih tinggi akan lebih mudah tercapai.

Menurut penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Meylina Astri, Sri Indah Neken Sari, Harya Kuncara W.¹⁶, dengan hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sector pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia baik secara simultan maupun parsial. Menunjukkan bahwa angka pengeluaran pemerintah sector kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia. Berikut merupakan data Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019

¹⁵ Muliza, T. Zulham, Chenny Seftarita, "Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Aceh", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 3 No. 1 2017, Hal. 54

¹⁶ Meylina Astri, Sri Indah Niken Sari, dan Harya Kuncara W., "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sector Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia" *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2013.



Sumber: <https://www.djpk.kemenkey.go.id/>

Gambar 1.4 PP Sektor Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar 1.5 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mengalami kenaikan dan penurunan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015 hingga 2017 mengalami kenaikan dan kenaikan tertinggi ada pada tahun 2017 yang mencapai angka hingga Rp. 2.401.552.552,00. Sedangkan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp. 2.315.107.791.219 dan tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 1.907.322.924.817.

Aspek pengeluaran pemerintah termasuk salah satu aspek dari penggunaan sumber daya ekonomi secara langsung yang dimiliki dan/tidak dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat. Menurut Wagner, pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Ini teorinya yaitu semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran

pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.¹⁷ Pengeluaran pemerintah lebih mempunyai hubungan yang kuat dengan PDRB atau pertumbuhan ekonomi karena belanja pembangunan ditujukan untuk membiayai fungsi *agent of development* dan dari pengeluaran ini akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian.¹⁸

Menurut Arsyad pendapatan per kapita sering kali digunakan pula sebagai indikator pembangunan selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju dengan NSB. Dengan kata lain, pendapatan perkapita selain bisa memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan terkait kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi diantara berbagai negara.¹⁹

PDRB perkapita merupakan hasil bagi dari pendapatan regional dengan jumlah penduduk. Norton menyatakan bahwa apabila pertumbuhan PDRB per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Secara ekonomi makro, PDRB perkapita dapat mempengaruhi *human development index*. Peningkatan PDRB per kapita akan meningkatkan standar hidup layak masyarakat sehingga daya beli juga mengalami peningkatan. Peningkatan daya beli berdampak pada peningkatan *human development index*.²⁰

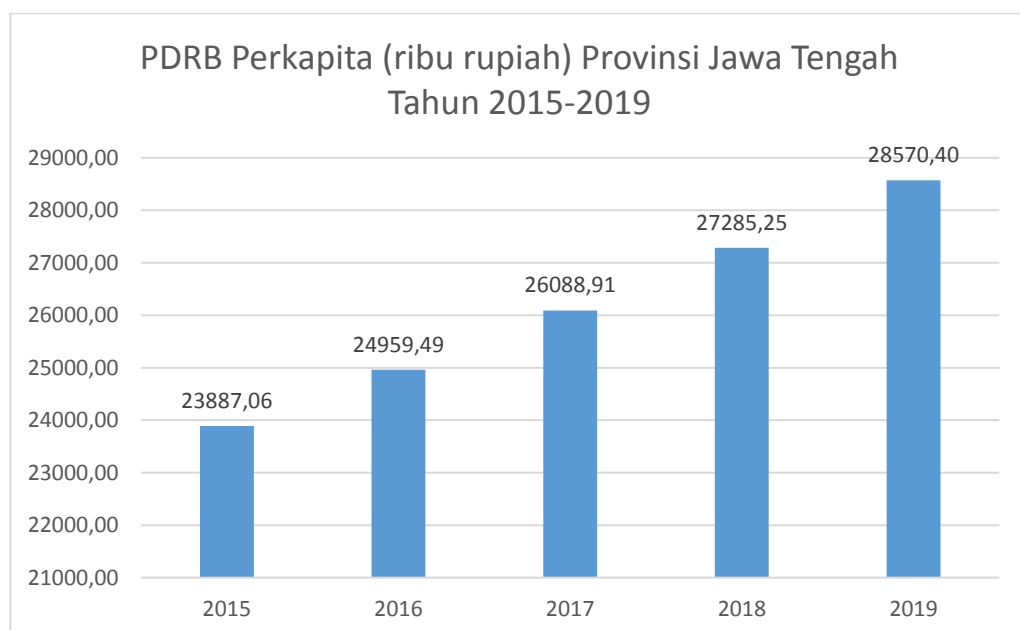
¹⁷ Ranifal Anugra, Taufiq Marwa dan Imelda, “Analisis Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 14, No. 1, 2016.

¹⁸ Harry A. P. Sitaniapessy, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan PAD”, *Jurnal Economica*, Vol 9, No, 1, 2013.

¹⁹ Diah Larasati, Skripsi: *Analisis Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, PDRB Perkapita, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 45

²⁰ Amirul Zamharir, SKRIPSI: *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita dan Upah Minimum terhadap Human Development Index: Studi Kasus 12 Provinsi dengan Kategori Lower Medium di Indonesia*: (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), hlm. 7.

Dalam penelitian Ayunanda Meliana dan Ismaini Zain²¹, dengan hasil penelitiannya menunjukkan terdapat tujuh variable yang berpengaruh signifikan terhadap IPM antara lain variable rasio siswa terhadap guru, angka partisipasi SMP/Mts, jumlah sarana kesehatan, persentase RT dengan akses air bersih, kepadatan penduduk, tingkat partisipasi kerja dan PDRB perkapita, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk dan PDRB perkapita memiliki hubungan/pengaruh yang positif dan signifikan dengan IPM di Jawa Timur.



Gambar 1.5 PDRB Perkapita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa PDRB per kapita Jawa Tengah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Terlihat pada tahun 2015 sebesar Rp. 23.887.000 dan di tahun 2019 mencapai Rp. 28.570.000 PDRB Perkapita atas dasar harga konstan di Jawa Tengah menempati posisi keempat di Pulau Jawa yaitu sebesar Rp. 28.570.000 PDRB perkapita tertinggi di Pulau Jawa yaitu PDRB Perkapita DKI Jakarta sebesar Rp. 173.918.000 sedangkan terendah yaitu PDRB Perkapita DI Yogyakarta sebesar Rp. 27.189.000

²¹ Ayunanda Meilana dan ismaini Zain, "Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel" *Jurnal Sains da Seni Pomits*, Vol. 2, No. 2, 2013.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan serta terdapat perbedaan hasil penelitian dari variable yang sama dari peneliti sebelumnya, maka menjadikan hal tersebut sebagai alasan peneliti untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui **Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka identifikasi masalah yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah penduduk di Jawa Tengah dari tahun 2015 hingga 2019.
2. Presentase pengeluaran pemerintah sector kesehatan mengalami penurunan di tahun 2017 hingga 2019.
3. Peningkatan PDRB perkapita di Jawa Tengah tahun 2015-2019.
4. Peningkatan IPM di Jawa Tengah selama tahun 2015-2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendapatan perkapita secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

a. Untuk Penulis

Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulisan tentang pengaruh jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019.

b. Untuk Masyarakat Jawa Tengah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktual yang berkaitan dengan pengaruh jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019.

c. Untuk Akademik

Sebagai referensi yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan pengaruh jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan

dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019.

2. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam bidang keilmuan guna untuk memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini berfokus pada variabel *independent*/bebas (X) dan variabel *dependent*/terikat (Y). Penelitian ini memiliki 3 variabel bebas yaitu jumlah penduduk (X1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X2), pendapatan perkapita (X3), dan satu variabel terikatnya adalah indeks pembangunan manusia (Y). Populasi atau subjek dari penelitiannya adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu pada tingkat indeks pembangunan manusia (IPM), data jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendapatan perkapita yang telah dipublikasikan oleh BPS.

2. Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan, yang bertujuan untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas. Keterbatasan tersebut diantaranya:

- a. Penelitian ini berfokus pada pengaruh jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019.

- b. Penelitian ini mengambil sampel dari data 5 tahun terakhir yaitu 2015-2019 karena keterbatasan dalam ketersediaan data untuk tiap variabelnya.
- c. Metode pengumpulan data berfokus pada menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah upaya agar tidak terjadi penafsiran yang salah terhadap istilah-istilah pokok yang digunakan dalam penelitian.²²

1. Penegasan Secara Konseptual

- a. Indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*) adalah barometer untuk mengukur pencapaian sosioekonomi suatu negara dengan menggabungkan antara aspek Kesehatan, Pendidikan, dan juga pendapatan sesungguhnya per kapita yang telah disesuaikan.²³
- b. Jumlah penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama sebulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.²⁴
- c. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji.²⁵

²² Taufiqur Rahman, *Kiat-kiat Menulis Karya Ilmiah Remaja*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), Hlm. 106.

²³ Rossanto Dwi Handoyo, "Ekonomi Sumber Daya Manusia" dalam <https://www.pustaka.ut.ac.id> diakses 9 September 2021

²⁴ Saharuddin Didu dan Ferri Fauzi, *Pengaruh Jumlah...*, hlm. 100-114

²⁵ *Ibid.*, hlm. 21

- d. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk pada suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun.²⁶
2. Penegasan Secara Operasional
 - a. Variable indeks pembangunan manusia yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diukur dengan jumlah indeks pembangunan manusia menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015-2019. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
 - b. Variable jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diukur dengan jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015-2019. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
 - c. Variable pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diukur dengan jumlah kesehatan menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015-2019. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
 - d. Variable pendapatan perkapita yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diukur dengan jumlah pendapatan perkapita menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015-2019. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

H. Sistematika Pembahasan

1. Bagian Awal
 - a. Halaman sampul depan
 - b. Halaman sampul dalam
 - c. Halaman persetujuan pembimbing
 - d. Halaman pengesahan penguji
 - e. Halaman motto
 - f. Halaman persembahan
 - g. Kata pengantar

²⁶ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 423

- h. Halaman daftar isi
 - i. Halaman daftar tabel
 - j. Halaman daftar gambar
 - k. Halaman daftar lampiran
 - l. Halaman abstrak
2. Bagian Utama
- a. **BAB I**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang suatu penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.
 - b. **BAB II**

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori yang membahas variabel atau sub variabel pertama, kedua dan seterusnya, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.
 - c. **BAB III**

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi, sampel dan sampling penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan analisis data.
 - d. **BAB IV**

Bab ini menguraikan tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis.
 - e. **BAB V**

Bab ini menguraikan tentang jawaban masalah penelitian, menafsirkan temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian, memodifikasi teori yang ada, dan menjelaskan implikasi dari hasil penelitian.
 - f. **BAB VI**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

3. Bagian Akhir
 - a. Daftar Pustaka
 - b. Lampiran
 - c. Surat pernyataan keaslian tulisan
 - d. Daftar Riwayat Hidup